



BAB I

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda mempunyai tugas membentuk Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana terulang dalam peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan tugas tersebut Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Bappeda terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub bagian Evaluasi.
4. Bidang Fisik Prasarana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air;
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian kebijakan Perundang-undangan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yaitu dengan diperolehnya piagam penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai 10 besar terbaik perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota. Diharapkan tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan yaitu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini disajikan dengan Basis Akrua sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrul;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrul pada Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Kebijakan Umum dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Umum APBD
- 2.2 Pencapaian Target Kinerja

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Pengukuran Pendapatan
 - 4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja
 - 4.3.3 Pengukuran Transfer
 - 4.3.4 Pengukuran Pembiayaan
 - 4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas
 - 4.3.6 Pengukuran Piutang
 - 4.3.7 Pengukuran Persediaan
 - 4.3.8 Pengukuran Investasi
 - 4.3.9 Pengukuran Aset Tetap
 - 4.3.10 Penyusutan Aset Tetap
 - 4.3.11 Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan
 - 4.3.12 Pengukuran Aset Lain
 - 4.3.13 Pengukuran Kewajiban
 - 4.3.14 Pengukuran Ekuitas
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
 - 4.4.1 Koreksi Kesalahan
 - 4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak
 - 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
 - 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum
 - 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha
 - 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu
 - 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 5.1.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 5.1.1.1.4.1 Dana Alokasi Umum
 - 5.1.1.1.4.2 Dana Alokasi Khusus
 - 5.1.1.1.5 Transfer Pemerintah Lainnya-Dana Penyesuaian
 - 5.1.1.1.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 5.1.1.1.7 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Provinsi
 - 5.1.1.1.8 Transfer Pemerintah Provinsi
 - 5.1.1.2 Pendapatan Lainnya



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- 5.1.2 Belanja
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai
 - 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
 - 5.1.2.1.3 Belanja Hibah
 - 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial
 - 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 5.1.2.2 Belanja Modal
 - 5.1.2.2.1 Belanja Tanah
 - 5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
 - 5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
 - 5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
 - 5.1.2.3 Belanja Aset Lainnya
 - 5.1.2.4 Belanja Tidak Terduga
- 5.1.3 Pembiayaan Netto
 - 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
- 5.1.4 Pembiayaan
- 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Belanja
 - 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 NERACA
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.1.1 Kas di Kas Daerah
 - 5.3.1.2 Kas di Bendahara Daerah
 - 5.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan
 - 5.3.1.4 Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional
 - 5.3.1.5 Kas di Bendahara Badan Jaminan Umum Daerah
 - 5.3.1.6 Kas Lain-lain
 - 5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek
 - 5.3.1.8 Piutang Pajak



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- 5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak
- 5.3.1.9 Piutang Retribusi
 - 5.3.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi
- 5.3.1.10 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - 5.4.1.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah
- 5.3.1.11 Piutang Bagi Hasil Provinsi
- 5.3.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
- 5.3.1.13 Persediaan
- 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.2.1 Investasi Non Permanen
 - 5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)
- 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.3.1 Tanah
 - 5.3.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 5.3.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 5.3.3.6 Akumulasi Penyusutan
- 5.3.4 Dana Cadangan
- 5.3.5 Aset Lainnya
 - 5.3.5.1 Aset Tak Berwujud
 - 5.3.5.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - 5.3.5.3 Aset Lain-lain
 - 5.3.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
- 5.3.6 Kewajiban
 - 5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.3.6.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga
 - 5.3.6.3 Utang Bunga
 - 5.3.6.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - 5.3.6.5 Pendapatan Diterima Dimuka
 - 5.3.6.6 Utang Beban
 - 5.3.6.7 Utang Jangka Pendek Lainnya
- 5.4 LAPORAN OPERASIONAL
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah-LO
 - 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO
 - 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
 - 5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- 5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Aseli Daerah yang Sah-LO
- 5.4.2.2 Pendapatan Transfer-LO
 - 5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
 - 5.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak-LO
 - 5.4.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO
 - 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO
 - 5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
 - 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO
 - 5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan-LO
- 5.4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
 - 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO
 - 5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LO
- 5.4.2 Beban-LO
 - 5.4.2.1 Beban Operasi
 - 5.4.2.1.1 Beban Pegawai
 - 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa
 - 5.4.2.1.3 Beban Hibah
 - 5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial
 - 5.4.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - 5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang
 - 5.4.2.1.7 Beban Prgawai BOS
 - 5.4.2.2 Beban Transfer
 - 5.4.2.2.1 Surplus/Defisit-LO
- 5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 - 5.5.1 Ekuitas Awal
 - 5.5.2 Surplus/Defisit-LO
 - 5.5.3 Koreksi-Koreksi
 - 5.5.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KOTA BANJARBARU

TAHUN 2020

2.1 Kebijakan Umum APBD

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Klasifikasi belanja tersebut diatas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan ke dalam satu organisasi. Disamping itu belanja juga diklasifikasikan menurut program dan kegiatan, menurut kelompok belanja terdiri dari belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja Pegawai saja.

Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal.

2.2 Pencapaian Target Kinerja

Bappeda Kota Banjarbaru selama tahun 2020 telah melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Sasaran-sasaran tahun 2020 pada Bappeda Kota Banjarbaru telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banjarbaru.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2020 adalah sebagaimana dalam table berikut :



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

TABEL 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banjarbaru
Tahun 2020

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkatkan keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	98,93%
2	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Prosentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang	100%	98,56%
3	Meningkatkan dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru	100%	100%
4	Meningkatkan penerapan inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%
5	Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah	Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%

Capaian atas indikator kinerja diatas didukung melalui program-program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan disiplin Aparatur.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Perencanaan Sosial dan Budaya
8. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
9. Pengembangan dan Penelitian.

Adapun pencapaian target kinerja Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA KOTA BANJARBARU

NO	KODE PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	%
	4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	996.156.950	894.612.490	89.81
1	4.03.4.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik	196.650.000	167.864.600	85.36
2	4.03.4.03.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	18.000.000	17.100.000	95.00
3	4.03.4.03.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.951.000	31.951.000	100
4	4.03.4.03.01.01.01.11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	31.740.000	30.490.000	96.06
5	4.03.4.03.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.839.700	75.756.400	99.89
6	4.03.4.03.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.635.000	4.635.000	100
7	4.03.4.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan Dan Minuman	44.304.000	43.830.000	98.932
8	4.03.4.03.01.01.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	308.037.250	253.225.490	82.21
9	4.03.4.03.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	285.000.000	269.760.000	94.65
	4.03.4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	440.825.000	387.806.057	87,97
1	4.03.4.03.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	119.060.000	112.712.900	94.67
2	4.03.4.03.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan	19.500.000	19.500.000	100



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

		Gedung kantor			
3	4.03.4.03.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	3.000.000	2.899.000	96.63
4	4.03.4.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	68.100.000	65.025.000	95.48
5	4.03.4.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	33.200.000	23.259.776	70.06
6	4.03.4.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	135.961.000	105.679.381	77.73
7	4.03.4.03.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.400.000	4.400.000	100
8	4.03.4.03.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	57.604.000	54.330.000	94.32
	4.03.4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.618.700	59.130.650	97,55
1	4.03.4.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.839.200	28.651.450	96.02
2	4.03.4.03.01.01.06.05	Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan	26.300.500	26.000.200	98.86
3	4.03.4.03.01.01.06.09	Perencanaan Dan Pelaporan Manajemen	4.479.000	4.479.000	100
	4.03.4.03.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.034.190.450	946.263.450	91,50
1	4.03.4.03.01.01.21.08	Penyusunan RKPD	233.605.000	231.105.000	98.93
2	4.03.4.03.01.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	91.893.500	90.568.500	98.56
3	4.03.4.03.01.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	253.647.250	247.935.250	97.75
4	4.03.4.03.01.01.21.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan	396.645.000	323.405.000	81.54
5	4.03.4.03.01.01.21.15	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	5.519.200	5.444.200	98.64
6	4.03.4.03.01.01.21.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	52.880.500	47.805.500	90.40



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	4.03.4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	76.975.750	75.965.750	98,69
1	4.03.4.03.01.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	11.975.750	10.965.750	91.57
2	4.03.4.03.01.01.22.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	65.000.000	65.000.000	100
	4.03.4.03.01.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	269.661.500	227.943.250	84,53
1	4.03.4.03.01.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	36.662.000	28.032.000	76.46
2	4.03.4.03.01.01.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	1.410.000	1.305.750	92.61
3	4.03.4.03.01.01.23.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	185.651.750	160.021.500	86.19
4	4.03.4.03.01.01.23.08	Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	45.937.750	38.584.000	83.99
	4.03.4.03.01.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	954.091.060	922.573.560	96,70
1	4.03.4.03.01.01.24.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	16.299.900	14.619.900	89.69
2	4.03.4.03.01.01.24.08	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	501.295.700	474.748.200	94.70
3	4.03.4.03.01.01.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	436.495.460	433.205.460	99.25
	4.03.4.03.01.01.26	Program Pengembangan dan Penelitian	175.576.000	162.248.000	92,41
1	4.03.4.03.01.01.26.01	Diseminasi Hasil Penelitian	9.053.000	6.953.000	76.80
2	4.03.4.03.01.01.26.05	Jaringan Penelitian	0	0	0
3	4.03.4.03.01.01.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	74.835.000	68.551.000	91.60
4	4.03.4.03.01.01.26.07	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, inovasi dan	91.688.000	86.744.000	94.61



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	Teknologi			
JUMLAH		4.008.095.410	3.676.543.207	91,73

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 mendapat dukungan dana sebesar Rp 7.830.002.480,- namun dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID 19 sehingga anggaran Bappeda menjadi sebesar Rp. 3.362.131.165,- atau turun sebesar 69,95 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan anggaran Rp. 11.192.133.645,- yang terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Sumber Dana Bappeda

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.821.907.070	3.729.160.386	97,57 %
2	BELANJA LANGSUNG	4.008.095.410	3.676.543.207	91.73 %
	APBD			
	JUMLAH	7.830.002.480	7.405.703.593	94.58 %

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru mendapat dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.821.907.070,- dan terealisasi sebesar Rp 3.729.160.386,- atau sebesar 97,57 %. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp 3.714.055.728,- realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 15.104.658,- atau sebesar 99.6 % dari realisasi tahun lalu.

Sementara dari sisi Belanja Langsung untuk tahun anggaran 2020, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru mengalokasikan sebesar Rp. 4.008.095.410 ,- dan terealisasi sebesar Rp



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

3.676.543.207,- atau sebesar 91.73 %. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2019 yang sebesar Rp 6.705.355.133,- realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan karena pengurangan untuk dana Covid 19 sebesar Rp 3.028.811.926,- atau penurunan sebesar 54.82 %.

Jika dilihat dari pencapaian realisasi keuangan yang menunjukkan 94,58 %, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk tahun 2020 sangat baik. Namun jika dilihat dari pencapaian realisasi output kegiatan secara fisik akan diperoleh angka sebesar 98.93%. Hasil tersebut diperoleh dengan memperhitungkan rasio target dengan realisasi output dimana dari 41 semua kegiatan memenuhi target output.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis

akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.



4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud

4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
- a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- b) Penghapusbukuan (*write down*)
- Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)
- Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.



Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.

d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan

berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus

/straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing



dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit –LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan



terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsiten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

2	Pendapatan Transfer				
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
TOTAL					

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020h (Rp)	%
1	Pajak Daerah			
2	Retribusi Daerah			
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
4	Lain-Lain PAD yang Sah			
TOTAL				

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Pajak Hotel			
2	Pajak Restoran			
3	Pajak Hiburan			
4	Pajak Reklame			
5	Pajak Penerangan Jalan			
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C			
7	Pajak Parkir			
8	Pajak Air Bawah Tanah			
9	Pajak Bumi dan Bangunan			
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
TOTAL				

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

2	Retribusi Jasa Usaha			
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
TOTAL				

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan- Puskesmas			
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum			
4	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios			
5	Retribusi PKB-Mobil Barang/ Beban-Pick Up			
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

0

0

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan			
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor			
3	Retribusi Terminal			
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
5	Retribusi Tempat Pariwisata			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
TOTAL				

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
2	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi			
3	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Badan			
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan			
TOTAL				

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Bank Kal-Sel			
TOTAL				

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Penerimaan Jasa Giro	-		
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)			
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
4	Pendapatan Denda Pajak			
5	Pendapatan Dari Pengembalian			
6	Pendapatan BLUD			
7	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya			
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

TOTAL			
--------------	--	--	--

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
3	Transfer Pemerintah Provinsi			
4	Pendapatan Lainnya			
TOTAL				

**Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak			
2	Bagi Hasil Bukan			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	Pajak/Sumber Daya Alam			
3	Dana Alokasi Umum			
4	Dana Alokasi Khusus			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan			
2	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan			
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

3	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi (Royalti)			
4	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan			
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi			
TOTAL				

5.1.1.1.4.1 Dana Alokasi Umum

5.1.1.1.4.2 Dana Alokasi Khusus

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

N o	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	DAK Bidang Pendidikan			
2	DAK Bidang Kesehatan			
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan			
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi			
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum			
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi			
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

8	DAK Bidang Pertanian			
9	DAK Bidang Lingkungan Hidup			
10	DAK Bidang Keluarga Berencana			
11	DAK Bidang Kehutanan			
12	DAK Bidang Perdagangan			
13	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat			
14	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
TOTAL				

5.1.1.1.5 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya-Dana Penyesuaian

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD			
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD			
TOTAL				

5.1.1.1.6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5.1.1.1.7 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
----	--------	-----------------------------	------------------------------	---



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor			
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan			
5	Bagi Hasil Pajak Rokok			

5.1.1.1.8 Transfer Pemerintah Provinsi

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi			
TOTAL				

5.1.1.2 Pendapatan Lainnya

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA	Realisasi TA	%
----	--------	-------------	--------------	---



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

		2019	2019	
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah			
TOTAL				

5.1.2 Belanja

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

7.405.703.593,-

10.419.410.861,-

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	7.103.752.480	6.717.934.193	94,57	8.370.735.691
2	Belanja Modal	726.250.000	687.769.400	94,70	2.048.675.170
3	Belanja Tidak Terduga				0
TOTAL		7.830.002.480	7.405.703.593	94,58	10.419.410.861



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
6.717.934.193,-	8.370.735.691,-

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.821.907.070	3.729.160.386	97,57
2	Belanja Barang dan Jasa	3.281.845.410	2.988.773.807	91,07
3	Hibah			
4	Bantuan Sosial			
5	Bantuan Keuangan			
TOTAL		7.103.752.480	6.717.934.193	94,57



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.294.257.020	2.253.619.651	98,23
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.527.650.050	1.475.540.735	96,59
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH			
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah			
5	Belanja Penghasilan Lainnya			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

6	Uang Lembur			
7	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			
8	Belanja Honorarium Non Pegawai			
9	Belanja Pegawai Operasional BLUD			
TOTAL		3.821.907.070	3.729.160.386	97,57

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	344.397.100	343.626.500	99,78
2	Belanja Bahan/Material			
3	Belanja Jasa Kantor	1.178.360.060	1.120.309.660	95,07
4	Belanja Premi Asuransi			
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.081.000	31.159.157	43,23
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.282.000	232.647.000	96,42
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

9	Belanja Sewa Alat Berat			
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor			
11	Belanja Makanan dan Minuman	312.828.000	283.441.000	90,61
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
13	Belanja Pakaian Kerja			
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			
15	Belanja Perjalanan Dinas	323.597.250	259.225.490	80,11
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.400.000	5.400.000	100
18	Belanja Pemeliharaan	72.100.000	69.630.000	96,57
19	Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	468.400.000	395.175.000	84,37
20	Belanja Honorarium Non PNS	263.400.000	248.160.000	94,21
21	Belanja Jasa Konsultasi			
22	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga			
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD			
24	Belanja Sewa Kesenian dan Budaya			
TOTAL		3.281.845.410	2.988.773.807	91,07

5.1.2.1.3 Belanja Hibah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
2	Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
TOTAL				

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat			
TOTAL				

**5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa**

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran TA	Realisasi TA	%
----	--------	-------------	--------------	---



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

		2020 (Rp)	2020 (Rp)	
1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik			
TOTAL				

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

687.769.400,-

2.048.675.170,-

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	105.000.000	98.601.900	93,91
3	Belanja Gedung dan Bangunan			
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.000.000	46.925.000	93,85
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	470.800.000	445.642.500	94,66



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

6	Belanja Aset Lainnya	100.450.000	96.600.000	96,17
TOTAL		726.250.000	687.769.400	94,70

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Tanah Perkampungan			
2	Kebun Campuran			
3	Tanah untuk Bangunan Gedung			
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Bukan Gedung			
TOTAL				

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
----	--------	-----------------------------	------------------------------	---



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat			
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu			
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin			
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin			
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur			
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan			
9	Belanja Mdl Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan			
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor			
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.500.000	27.037.900	98,32
12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.500.000	19.500.000	100
13	Belanja Modal Pengadaan	3.000.000	2.899.000	96,63



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	55.000.000	49.165.000	89,39
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar			
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran			
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan			
19	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium			
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah			
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika			
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan			
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
24	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
25	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api			
26	Belanja Modal Pengadaan Amunisi			
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan			
28	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit			
TOTAL		105.000.000	98.601.900	93,91

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah			
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan			
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

TOTAL			
--------------	--	--	--

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan			
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan			
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut			
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana			
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor			
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih			
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik			
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan			
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum			
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	50.000.000	46.925.000	93,85
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon			
TOTAL		50.000.000	46.925.000	93,85

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	469.240.000	444.082.500	94,64
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan			
3	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan			
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.560.000	1.560.000	100



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

TOTAL	470.800.000	445.642.500	94,66
--------------	-------------	-------------	-------

5.1.2.3 Belanja Aset Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.450.000	96.600.000	96,17
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain			
TOTAL		100.450.000	96.600.000	96,17

5.1.2.4 Belanja Tidak Terduga Surplus/Defisit LRA

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
424.298.887,-	772.722.784,-

Tabel Surplus/Defisit LRA

5.1.3 Pembiayaan Netto

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
7.405.703.593,-	10.419.410.861,-

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pendapatan				
2	Belanja	7.830.002.480	7.405.703.593	94,58	10.419.410.861
Surplus/Defisit			424.298.887		772.722.784

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
2	Pencairan Dana Cadangan			
TOTAL				

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%
----	--------	---------------------	----------------------	---



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

		(Rp)	(Rp)	
1	Penyertaan Modal pada Bank			
2	Penyertaan Modal pada PDAM			
3	Penyertaan Modal pada Bangun Banua			
TOTAL				

5.1.3.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

31 Desember 2020
(Rp)

424.298.887,-

31 Desember 2019
(Rp)

772.722.784,-

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pendapatan				
2	Belanja	7.830.002.480	7.405.703.593	94,58	10.419.410.861
3	Surplus (Defisit)				
4	Pembiayaan Netto				
SILPA			424.298.887	5,42	668.089.223



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal

Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
7.830.002.480,-	7.405.703.593,-	10.419.410.861,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) adalah selisih dari anggaran yang tersedia dengan realisasi. Anggaran belanja Tahun 2020 sebesar Rp.7.830.002.480,- dikurangi dengan realisasi Tahun 2020 sebesar

Rp.7.405.703.593,- maka didapat SiLPA tahun 2020 sebesar Rp.424.298.887,- atau 5,42%

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
--------------------------	---------------------------	---------------------------

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Bappeda Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Aset Bappeda Kota Banjarbaru per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.959.531.059,12 dan Rp 3.595.909.635,57 Saldo Aset per 31 Desember 2020 **Naik** sebesar Rp 363.621.423,55 atau sebesar 10,11% dari Saldo Aset per 31 Desember 2019. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

(Rupiah)

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

31 Desember 2020
(Rp)

-

31 Desember 2019
(Rp)

-

5.3.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2020
(Rp)

-

31 Desember 2019
(Rp)

-

5.3.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.6 Kas Lain-lain

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.8 Piutang Pajak

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
-	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.1.9 Piutang Retribusi

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

(Rupiah)

5.3.1.10 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.1.11 Piutang Bagi Hasil Provinsi

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.1.13 Persediaan

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>700.000,-</u>	<u>638.000,-</u>

Nilai Persediaan di akhir tahun 2020 sebesar Rp.700.000,- merupakan barang habis pakai yang hanya terdiri dari Alat Tulis Kantor

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>-</u>	<u>-</u>

5.3.2.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>-</u>	<u>-</u>

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>-</u>	<u>-</u>

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2020

(Rp)

3.766.905.965,92

31 Desember 2019

(Rp)

3.356.740.342,37

Komponen Aset Tetap	Tahun 2020	Tahun 2019
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.771.262.895,92	2.710.411.712,92
Gedung dan Bangunan	638.989.600	638.989.600
Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.870.000	103.945.000
Aset Tetap Lainnya	2.640.620.510	2.112.728.010
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Aset Tetap	6.201.743.005,92	5.566.074.322,92

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.710.411.712,92	2.771.262.895,92	60.851.183	2,25
Gedung dan Bangunan	638.989.600	638.989.600	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.945.000	150.870.000	46.925.000	45,14
Aset Tetap Lainnya	2.112.728.010	2.640.620.510	527.892.500	24,99
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Aset Tetap	5.566.074.322,92	6.201.743.005,92	635.668.683	11,42

No.	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
1							
2							
3							
4							
5							

Secara total Aset tetap terjadi kenaikan, untuk peralatan dan mesin terjadi kenaikan dikarenakan adanya nilai penambahan Peralatan dan Mesin (belanja modal dan Reklass asset tetap lainnya) lebih tinggi daripada Pengurangan yang terdiri dari Reklass ke Extracomptable, Penghapusan Aset dan Reklass antar KIB (ke Aset Lainnya Rusak Berat)

Untuk Aset Gedung tidak terjadi perubahan nilai. Pada Aset Jalan, Irigasi dan jaringan hanya bertambah belanja modal instalasi jaringan listrik. Untuk Aset Tetap lainnya terjadi kenaikan sebesar Rp.527.892.500,- atau 24,99% yang disebabkan oleh belanja modal dan Reklass Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud lebih tinggi daripada pengurangan

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

No.	URAIAN	TANAH
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

No	Tahun Perolehan	Kode Barang	Register	Uraian	Nilai

B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

C. Penambahan Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

Rincian Daftar Belanja Modal Tanah Bangunan Pasar

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah Bangunan Pasar Landasan Ulin	
2.	Tanah Bangunan Pasar Liang Anggang	
3.	Tanah Bangunan Pasar Banjarbaru Utara	
4.	Tanah Bangunan Pasar Cempaka	
Total		

Rincian Daftar Mutasi Tanah Bangunan Antar SKPD

No.	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

D. Pengurangan terhadap Aset Tetap-Tanah tahun sebesarRp

NO .	KODE BARANG	Jenis Barang / Nama Barang	Persil	Keterangan			
				Sertifikat	Sporadik	SKT	Tanpa Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020

(Rp)

2.771.262.895,92

31 Desember 2019

(Rp)

2.710.411.712,92

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp. 78.950.717,-**

No	Kode Barang	URAIAN	Perubahan Kebijakan Aset jadi Extra
1	BBA	Extra Comptable	5.936.900
2			
3			
4			
			5.936.900

Ada beberapa Aset yang nilai perolehannya berdasarkan kebijakan tidak lagi menjadi aset yang masuk kategori peralatan dan mesin sehingga harus direklass ke extracomptable



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Kode Barang	URAIAN	Koreksi catat
1		Penghapusan 2020	30.856.500
2		Reklass antar KIB (ke asset Rusak Berat)	42.157.317
3			
4			
			73.013.817

Aset peralatan dan mesin yang sudah rusak berat harus dilakukan penghapusan, Aset Peralatan dan Mesin Bappeda Kota Banjarbaru yang rusak berat sebesar Rp.42.157.317,-dihapuskan dengan melakukan reklass antar KIB (ke asset lainnya (RB))

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin juga terjadi karena penghapusan asset peralatan dan mesin sebesar Rp.30.856.500,-

B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp. 139.801.900,-

No	SKPD	Nama Barang	Tahun	Jlh Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	Bappeda	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	2020			1,000,000
2	Bappeda	Kipas Angin	2020			449,900
3	Bappeda	Kipas Angin	2020			588,000
4	Bappeda	Meja Kerja	2020			724,750
5	Bappeda	Meja Kerja	2020			724,750
6	Bappeda	Meja Kerja	2020			724,750
7	Bappeda	Meja Kerja	2020			724,750
8	Bappeda	Digital Audio Tape Recorder	2020			1,000,000
9	Bappeda	Kipas Angin	2020			5,000,000
10	Bappeda	Kipas Angin	2020			5,000,000
11	Bappeda	Kipas Angin	2020			5,000,000
12	Bappeda	Kipas Angin	2020			5,000,000
13	Bappeda	Kipas Angin	2020			5,000,000
14	Bappeda	Printer	2020			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Nama Barang	Tahun	Jlh Unit	Harga Satuan	Jumlah
						3,000,000
15	Bappeda	Printer	2020			3,000,000
16	Bappeda	Printer	2020			3,000,000
17	Bappeda	Printer	2020			3,000,000
18	Bappeda	Printer	2020			3,000,000
19	Bappeda	UPS	2020			1,500,000
20	Bappeda	UPS	2020			1,500,000
21	Bappeda	UPS	2020			1,500,000
22	Bappeda	Webcam	2020			5,000,000
23	Bappeda	Battery Charger	2020			3,152,500
24	Bappeda	Battery Charger	2020			3,152,500
25	Bappeda	Tripod Camera	2020			1,610,000
26	Bappeda	Lensa Kamera	2020			5,500,000
27	Bappeda	LCD Proyektor	2020			20,000,000
28	Bappeda	LCD Proyektor	2020			9,750,000
						98.601.900

No	Kode Barang	URAIAN	Koreksi catat
1		Belanja Barang dan Jasa 2020	34.950.000
2		Reklass Aset Tetap Lainnya (koreksi Audited)	6.250.000
3			
4			
			41.200.000

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

31 Desember 2020

(Rp)

638.989.600,-

31 Desember 2019

(Rp)

638.989.600,-

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2019	638,989,600.00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Saldo Awal 2020	638,989,600
5	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2020	-
	b. Retensi 5%	-
	c. Belanja Pegawai 2020	-
	d. Belanja Barang Jasa 2020	-
	e. BOP/BOS/BOM	-
	f. Hibah	-
	g. Penambahan KDP	-
	h. Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	-
6	Pengurangan :	
	a. Pengurangan KDP	-
	b. Non Aset	-
	c. Ekstra	-
	d. Penghapusan	-
	e. Pengembalian Dana	-
	f. Reklas ke RB	-
	g. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Kenaikan Tahun 2020	-
	Saldo Per 31 Desember 2020	638,989,600.00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp 0,-
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tetap-gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp.0,-

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
1		
2		
3		
Jumlah		

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2020
(Rp)
150.870.000,-

31 Desember 2019
(Rp)
103.945.000,-

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2019	103,945,000.00
a.	Koreksi Kurang	-
b.	Koreksi Tambah	-
2	Saldo setelah koreksi	103,945,000.00
3	Penambahan :	
a.	Belanja Modal 2020	46,925,000.00
b.	Retensi 5%	-
c.	BOP/BOS/BOM	-
d.	Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	46,925,000.00
4	Pengurangan	
a.	KDP	-
b.	Non Aset	-
c.	Pengembalian Dana	-
d.	Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	0.00
5	Saldo Akhir 2020	150,870,000.00

- A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp.0,-
- B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp.46.925.000,-
- C. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp.46.925.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Daftar Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

No.	NAMA SKPD	Jumlah	Retensi 5 %
1	Bappeda	46.925.000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Jumlah	46.925.000	

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2020
(Rp)
2.640.620.510,-

31 Desember 2019
(Rp)
2.112.728.010,-

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Akhir 2019	2,112,728,010.00
	a. Koreksi Tambah	-
	Saldo Awal 2020	2,112,728,010.00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2020	445,642,500.00
	b. Belanja Barang Jasa 2020	-
	c. BOP/BOS/BOM	-
	d. Hibah	-
	e. Mutasi Tambah	88,500,000.00
	Jumlah Penambahan	534,142,500.00
3	Pengurangan :	
	a. Ekstra	-
	b. Penghapusan	-
	c. Mutasi Kurang	6,250,000.00
	Jumlah Pengurangan	6,250,000.00
	Total Penambahan Tahun 2020	527,892,500.00
	Jumlah	2,640,620,510.00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

A. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp.534.142.500,-

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1	Bappeda	534.142.500
2		
3		
3		
4		
5		
	Jumlah	534.142.500

B. Pengurangan terhadap Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp.6.250.000,-

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Reklass ke Peralatan dan Mesin (saldo Audited)	6.250.000
2		
	Jumlah	6.250.000

5.3.3.6 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2020
(Rp)

2.434.837.040,02

31 Desember 2019
(Rp)

2.209.333.980,55

No	Uraian	Nilai Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,195,037,993.35
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	195,466,046.67
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	34,208,000.00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10,125,000.00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	2,434,837,040.02



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.4 Dana Cadangan

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

URAIAN	SAMPAI DENGAN 2014			SAMPAI DENGAN 2015		
	POKOK	BUNGA	JUMLAH	POKOK	BUNGA	JUMLAH
BRI						
BTN						
BANK KALSEL 1						
BNI						
BANK KALSEL 2.1						
BANK KALSEL 2.2						
BRI						
JUMLAH						

5.3.5 Aset Lainnya

5.3.5.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2020
(Rp)
378.131.000,-

31 Desember 2019
(Rp)
370.031.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	
1	Saldo awal	370,031,000.00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
	Saldo Awal 2020	370,031,000.00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2020	96,600,000.00
	b. Belanja Barang jasa 2020	-
	c. Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	96,600,000.00
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	-
	b. Mutasi Kurang	88,500,000.00
	Jumlah Pengurangan	88,500,000.00
	Total Penambahan Tahun 2020	8,100,000.00
	Jumlah	378,131,000.00

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap tak berwujud tahun 2020 sebesar Rp.88.5000.000,- (Reklass ke Aset Tetap Lainnya)
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tak berwujud tahun 2020 sebesar Rp.96.600.000,-
- C. Penambahan nilai aset tak berwujud Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda	96,600,000.00
2		
3		
4		
5		
	TOTAL	96,600,000.00

Belanja modal Aset tak berwujud tahun 2020 Berupa Pembuatan Video Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2020.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.5.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
210.718.600,-	156.012.400,-

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda Kota Banjarbaru	210.718.600
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Jumlah		210.718.600

5.3.5.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
291.949.533,-	249.792.216,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	
1	Saldo awal	249,792,216.00
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi Tambah	
	Saldo Awal 2020	249,792,216.00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2020	-
	b. Belanja Barang jasa 2020	
	c. Mutasi Tambah	42,157,317.00
	Jumlah Penambahan	42,157,317.00
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	-
	b. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Penambahan Tahun 2020	42,157,317.00
	Jumlah	291,949,533.00

- A. Koreksi tambah atas saldo aset lain-lain tahun 2020 sebesar Rp. 42.157.317,-
- B. Penambahan nilai aset lain-lain Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda Kota Banjarbaru	42,157,317.00
2		
3		
4		
5		
	TOTAL	42,157,317.00

Penambahan sebesar Rp.42.157.317,- merupakan Reklass antar KIB dari Peralatan dan Mesin yang masuk kategori Rusak Berat.

- C. Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp.0,00 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

SKPD	Nilai (Rp)
Bappeda Kota Banjarbaru	0.00
	0.00
TOTAL	0.00

5.3.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>267.436.839,80</u>	<u>225.279.522,80</u>

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda Kota Banjarbaru	267.436.839,80
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Jumlah		267.436.839,80

5.3.6 Kewajiban

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>13.034.751,-</u>	<u>128.489.627,-</u>

(Rupiah)

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19
1	Utang Beban	13.034.751	128.489.627
2			
3			
Jumlah		13.034.751	128.489.627

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>-</u>	<u>-</u>

5.3.6.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
--------------------------	--------------------------



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.6.3 Utang Bunga

-	-
31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.6.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.3.6.5 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

6.3.2.6 Utang Beban

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
13.034.751,-	128.489.627,-

Rupiah)

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19
1	Belanja Telpn	69.183	78.024
2	Belanja Air	566.400	687.740
3	Belanja Listrik	4.314.168	5.704.584
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.085.000	8.085.000
5	Tunjangan Kinerja Pegawai ub. Desember 2019	0	113.934.279
	JUMLAH	13.034.751	128.489.627

6.3.2.7 Utang Jangka Pendek lainnya

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

(Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1			
2			
3			
4			
	Jumlah		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO			-
2	Pendapatan Transfer-LO			-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO			-
TOTAL				

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Daerah-LO			-
2	Retribusi Daerah-LO			-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO			-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO			-
TOTAL				-

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Keterangan	Saldo Tahun 2019	Saldo tahun 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel - LO	-			-
2	Pajak Restoran - LO	-			-
3	Pajak Hiburan - LO	-			-
4	Pajak Reklame - LO	-			-
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	-			-
6	Pajak Parkir - LO	-			-
7	Pajak Air Tanah - LO	-			-
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	-			-
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	-			-
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	-			-
		-			

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Keterangan	Saldo Tahun 2020	Saldo tahun 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO				-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO				-
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO				-
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO				-
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO				-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO				-
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO				-
8	Retribusi Terminal - LO				-
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO				-
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO				-
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO				-
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO				-
13	Retribusi Izin Gangguan - LO				-
14	Retribusi Izin Trayek - LO				-
TOTAL					

NO	SKPD	Pendapatan Retribusi LO 2020
1	Dinas kesehatan	
2	Dinas pekerjaan umum	
3	Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika	
4	Dinas kebersihan dan pertamanan	
5	Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga	
6	Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	
7	Badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal	
8	Kecamatan banjarbaru selatan	
9	Kecamatan banjarbaru utara	
10	Kecamatan cempaka	
11	Kecamatan landasan ulin	
12	Kecamatan liang anggang	
13	Dinas pertanian, perikanan dan kehutanan	
14	Dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan	
TOTAL		

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

- -



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1		-	-	-
TOTAL		-		

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

-

-

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Keterangan	Saldo Tahun 2019	Saldo tahun 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Penerimaan Jasa Giro - LO				-
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO				-
3	Pendapatan Denda Pajak - LO				-
4	Pendapatan dari Pengembalian -LO				-
5	Pendapatan BLUD - LO				-
6	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO				-
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO				-
TOTAL					

NO	SKPD	Pendapatan Retribusi LO 2020
1	Dinas kesehatan	
2	Rsud kota banjarbaru	
3	Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	
4	Dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan	
TOTAL		

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

-

-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO		-	-
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO		-	-
3	Transfer Pemerintah Provinsi-LO		-	-
4	Bantuan Keuangan-LO		-	-
TOTAL				

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak			
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
3	Dana Alokasi Umum			
4	Dana Alokasi Khusus			
TOTAL				

5.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

Rincian Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	-	-	-
2	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	-	-	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

TOTAL			
--------------	--	--	--

5.4.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan		-	-
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)		-	-
3	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)		-	-
4	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan		-	-
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi		-	-
TOTAL			-	-

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

Dana Alokasi Khusus-LO

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

-

-

No	Rincian Pendapatan DAK	Nilai
1	DAK Bidang Infrastruktural Jalan - LO	
2	DAK Bidang Infrastruktural Jalan - LO	
3	DAK Bidang Infrastruktural Irigasi - LO	
4	DAK Bidang Infrastruktural Air Minum - LO	
5	DAK Bidang Infrastruktural Sanitasi- LO	
6	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	
7	DAK Bidang Kehutanan - LO	
8	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	
9	DAK Bidang Kesehatan - LO	
10	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

11	DAK Bidang Perdagangan - LO	
12	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	
13	DAK Bidang Pertanian - LO	
14	DAK Bidang Pendidikan - LO	
15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	
TOTAL		

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

-

-

Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD		-	-
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD		-	-
Jumlah			-	-

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

-

-

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan-LO

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

-

-

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp)

(Rp)

-

-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Nilai
1	Pendapatan Hibah – LO	
2	Pendapatan dana BOS	
3	Pendapatan Lainnya – LO	
TOTAL		

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-	-

5.4.2 Beban-LO

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6.960.402.099,39	8.888.824.696,08

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Operasi	6.960.402.099,39	8.888.824.696,08	(1.928.422.596,69) (21,69)
2	Beban Transfer		-	-
TOTAL			-	-

5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6.960.402.099,39	8.888.824.696,08

Rincian Beban Operasi



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	Penurunan (%)
1	Beban Pegawai-LO	3.615.226.107,00	3.827.990.007,00	(212.763.900,00) (5,56)
2	Beban Barang dan Jasa	2.952.241.210,00	4.650.321.541,00	(1.698.080.331,00) (36,52)
3	Beban Hibah	-	11.400.000,00	(11.400.000,00) (100)
4	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	392.934.782,39	399.113.148,08	(6.178.365,69) (1,55)
6	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
	Beban Pegawai BOS	-	-	-
	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-
TOTAL		6.960.402.099,39	8.888.824.696,08	(1.928.422.596,69) (21,69)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai-LO

31 Desember 2020
(Rp)
3.615.226.107,00

31 Desember 2019
(Rp)
3.827.990.007,00

Beban Pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.615.226.107,00 Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut :

No	Keterangan	Saldo tahun 2019	Saldo tahun 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	2.253.820.747	2.253.619.651	(201.096)	(0,01)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.574.169.260	1.361.606.456	(212.562.804)	(13,50)
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
4	Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
5	Beban Penghasilan Lainnya	-	-	-	-
6	Beban Honorarium PNS	-	-	-	-
7	Beban Honorarium Non PNS	-	-	-	-
8	Beban Uang Lembur	-	-	-	-
9	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
10	Beban Belanja Pegawai Operasional BLUD	-	-	-	-
		3.827.990.007	2.615.226.107	(1.212.763.900)	(31,68)

Belanja Pegawai tahun 2019 dan 2020 pada pos Beban Tambahan Penghasilan PNS dilakukan penyesuaian yang disebabkan karena Tunjangan Kinerja bulan Desember 2019 yang tidak bisa



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

terbayarkan di tahun anggaran 2019 baru bisa dilakukan pembayaran pada Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.113.934.279,-

5.4.2.1.2 Beban Barang Dan Jasa

31 Desember 2020
(Rp)
2.952.241.210,-

31 Desember 2019
(Rp)
4.650.321.541,-

No	Keterangan	Saldo Tahun 2019	Saldo tahun 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Persediaan	1.093.101.500	824.702.500	(268.399.000)	(24,55)
2	Beban Jasa	2.193.063.576	1.767.524.063	(425.539.513)	(19,40)
3	Beban Pemeliharaan	149.706.600	100.789.157	(48.917.443)	(32,68)
4	Beban Perjalanan Dinas	1.214.449.865	259.225.490	(955.224.375)	(78,65)
5	Beban Bunga	0	0	0	0
6	Beban Subsidi	0	0	0	0
TOTAL		4.650.321.541	2.952.241.210	(1.698.080.331)	(36,52)

5.4.2.1.3 Beban Hibah

31 Desember 2020
(Rp)
0,00

31 Desember 2019
(Rp)
11.400.000,00

Merupakan beban Hibah yang ditanggung oleh Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2020, terdiri dari jenis beban, dengan nilai total sebesar Rp. 0,- dan dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
1	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	0
2	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
	Jumlah	0

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2020
(Rp)
0,00

31 Desember 2019
(Rp)
0,00

No	Keterangan	Nilai
1	Beban Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
2	Beban Bantuan Sosial Santunan Kematian	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	Jumlah
--	---------------

5.4.2.1.5 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
392.934.782,39	399.113.148,08

No	SKPD	Total
1	Peralatan dan Mesin	294.828.259,06
2	Gedung dan Bangunan	18.156.823,33
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.543.500,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00
5	Aset Tak Berwujud	72.406.200,00
	TOTAL	392.934.782,39

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Rsud kota banjarbaru	-	-	-
2	Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika	-	-	-
3	Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga	-	-	-
4	Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	-	-	-
5	Dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan	-	-	-
	TOTAL	-	-	-

5.4.2.1.7 Beban Lain-lain

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.4.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

31 Desember 2020

(Rp)

0,00

31 Desember 2019

(Rp)

0,00

5.4.2.2.1 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2020

(Rp)

6.960.402.099,39

31 Desember 2019

(Rp)

8.890.968.144,36

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional	6.960.402.099,39	8.888.824.696,08	1.928.422.596,69 (21,69)
2	Beban Transfer	0	0	-
3	Defisit Non Operasional	0	2.143.448,28	2.143.448,28 (100,00)
Jumlah		6.960.402.099,39	8.890.968.144,36	1.930.566.044,97 (21,71)

5.5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.5.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2020

(Rp)

1.941.147.959,64

31 Desember 2019

(Rp)

1.941.147.959,64



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.5.2 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
(6.960.402.099,39)	(8.890.968.144,36)

5.5.3 Koreksi-Koreksi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
33.774.805,94	(2.170.667,71)

Koreksi atas nilai Ekuitas tahun 2020 terdiri dari :

1. Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset sebesar Rp.43.577.500,00
2. Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset sebesar (Rp.3.865.794,06)
3. Reklasifikasi Aset Intra menjadi asset extra sebesar (Rp.5.936.900,00)

5.5.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)
3.946.496.308,12	3.467.420.008,57

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIKD. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), Laporan Keuangan ini telah disajikan secara

penyusunan penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2020 selanjutnya dikonsolidasi ke CALK Pemerintah Kota Banjarbaru yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih belum dari sempurna, meskipun demikian upaya untuk selalu menyajikan penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian tetapi, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2020 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2020 yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Segala masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih baik, dan bertekad untuk mempertahankan predikat WTP.

Banjarbaru, Januari 2021

KEPALA BAPPEDA KOTA BANJARBARU



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Kanafi, S.IP,MM